

Jenis Artikel (Artikel Riset Reguler, Artikel Review, Bagian Khusus tentang Akuntansi)

Evaluasi Efektifitas Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Kepegawaian Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud

Evaluation of the Effectiveness of Realization of Regional Expenditures at the Agency for Personnel and Human Resource Development in the Talaud Islands Regency

Sunarty Misa¹, Jantje Tinangon², Stanley Walandouw³,

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : misadewi4@gmail.com , janjantinangon@gmail.com, stanleykho99@gmail.com

Abstrak: Belanja Daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam arah pembangunan daerah. Pendapatan daerah yang semakin meningkat dalam jumlah yang besar, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin lebih tinggi. Komponen belanja daerah digunakan untuk pengeluaran sektor publik. Objek penelitian ini yaitu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis efektifitas realisasi belanja daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020. Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud berada pada kriteria efektif

Kata Kunci: Belanja Daerah, Efektifitas

Abstract: Regional Expenditures reflect local government policies in the direction of regional development. Regional income is increasing in large numbers, then the funds owned by local governments are getting higher. The regional expenditure component is used for public sector expenditure. The object of this research is the Agency for Personnel and Human Resources Development of the Talaud Islands Regency. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the realization of regional expenditures at the Agency for Personnel and Human Resource Development in the Talaud Islands Regency in 2020. The analytical method used to discuss the problems in this research is descriptive analysis method. The results showed that the realization of regional expenditures at the Agency for Personnel and Human Resources Development in the Talaud Islands Regency was in the effective criteria

Keywords: Regional Expenditure, Effectiveness

PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan telah bergeser dari paradigma pembangunan yang bertumpu pada sentralisasi dan desentralisasi. Yang di maksud dari sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana semua kekuasaan berada pada pusat. Sedangkan desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan pada pemerintah daerah. Model pembangunan ini cukup efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat pedesaan. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan arus globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, serta adanya tuntutan reformasi dan otonomi daerah, telah memperlihatkan adanya kecenderungan perubahan lingkungan yang semakin cepat dan kompleks. Dalam pembangunan yang makin kompleks, masyarakat perlu diberikan rangsangan dan turut memikirkan jalan keluar pemecahannya, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2014 yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda)

Diterima: 18-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 21 -04-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

dikarenakan pmda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.

Prinsip dasar sistem perencanaan dan penganggaran adalah mengatur hak-hak pemerintah dalam memungut pendapatan negara/daerah yang sah, dan mengatur kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan belanja dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem perencanaan dan penganggaran ini mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan dan alokasi anggaran secara efektif dan efisien, sesuai dengan isi paragraf sampai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA), bahwa akuntansi pemerintahan menganut sistem akuntansi anggaran (*budgetary accounting*). Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa klasifikasi pendapatan dan belanja dalam pelaporan keuangan negara/daerah harus sudah ditentukan pada saat menyusun perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, agar penyajian laporan keuangan pemerintah memenuhi tujuan, yaitu laporan yang informatif dan dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan, dan efisiensi sumber daya, maka pada waktu menyusun perencanaan dan penganggaran, pengklasifikasian pendapatan dan belanja harus menyesuaikan dengan klasifikasi pendapatan dan belanja pada laporan keuangan negara/daerah.

Belanja Daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam arah pembangunan daerah. Pendapatan daerah yang semakin meningkat dalam jumlah yang besar, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin lebih tinggi. Komponen belanja daerah digunakan untuk pengeluaran sektor publik (Kasdy, 2018). Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 adalah Semua pengeluaran dari Rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia salah satu badan yang berada di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan ditemukan fakta bahwa rendahnya penyerapan anggaran selama ini salah satunya akibat lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Terlebih lagi kini di masa pandemi terdapat realokasi dan re-focusing yang memaksa pemerintah daerah untuk melakukan banyak penyesuaian di dalamnya. Ironisnya, meski pandemi telah terjadi lebih dari satu tahun, tak sedikit birokrasi yang hingga saat ini belum bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Alhasil dana yang seharusnya digunakan untuk program percepatan pembangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

1.1 Konsep Akuntansi

Menurut Hanafi dan Halim (2016), Akuntansi bisa didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut Shatu (2016:9), Menjelaskan terdapat tiga kegiatan utama dalam akuntansi yakni pengidentifikasian, pencatatan serta pengkomunikasian. Pengidentifikasian dilakukan untuk memilah peristiwa ekonomi yang relevan dengan bisnis perusahaan, selanjutnya perusahaan akan melakukan pencatatan dengan tujuan merekam peristiwa ekonomi yang nantinya akan dijadikan sebagai informasi guna mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan atau kepada pengguna laporan keuangan.

1.2 Konsep Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Sujarweni, 2016 : 18). Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi

keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Hasanah dan Fauzi, 2017:1). Menurut Wahyuningsih (2020:3) akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan Negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan.

1.3 Konsep Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut : “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Sedangkan menurut Kuswandi (2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi, 2014). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Dalam memberikan wewenang tersebut juga dibatasi undang-undang agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. (Siregar,2015).

1.5 Efektivitas Dalam Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Rasio efektivitas menurut Mahsun (2018: 191), dalam belanja daerah merupakan ukuran dari suatu keberhasilan lembaga atau organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Kemampuan daerah dapat dikatakan efektif apabila mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% persen.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (Sugiyono, 2017 ;213). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Realisasi Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui dan memahami tingkat Efektifitas Realisasi Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud dengan waktu penelitian dari bulan November 2021 sampai dengan selesai.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu yang berbentuk angka – angka yang dapat diukur atau dihitung seperti Laporan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020. . Data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar diantaranya gambaran umum Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu Laporan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang ada telah diolah dari instansi terkait di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan pendekatan : Analisis Efektivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian berdasarkan dokumentasi laporan realisasi anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 sebagai berikut :

Realisasi Belanja Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020

Realisasi belanja daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud tahun anggaran 2020 berdasarkan dokumentasi laporan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Belanja Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2022	Rp. 8.818.703.354,-	Rp. 8.110.742.147,-

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud 2021

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp 8.110.742.147,- tidak mencapai target sebesar Rp. 8.818.703.354,- atau terdapat selisih sebesar (Rp. 707.961.207,-).

Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020

Realisasi belanja tidak langsung Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020

Uraian	Target	Realisasi
Belanja Pegawai :		
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.462.917.515,-	Rp. 2.462.867.515,-
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 1.379.747.600,-	Rp. 1.363.924.267,-
Total Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.842.665.115,-	Rp. 3.826.791.782,-

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud 2021

Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai untuk belanja gaji dan tunjangan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2.462.867.515,- memenuhi target sedangkan belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp. 1.379.747.600,- tidak memenuhi target sebesar Rp. 1.379.747.600,- atau terdapat selisih sebesar (Rp. 15.823.333,-).

Realisasi Belanja Langsung Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020

Realisasi belanja langsung Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Realisasi Belanja Langsung Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020

Uraian	Target	Realisasi
Belanja Pegawai (Honorarium PNS)	Rp. 690.850.000,-	Rp. 234.839.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.826.808.239,-	Rp. 3.593.851.365,-
Belanja Modal	Rp. 458.380.000,-	Rp. 455.260.000,-
Total Belanja Langsung	Rp. 4.976.038.239,-	Rp. 4.283.950.365,-

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud 2021

Tabel 3. di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai honorarium PNS untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 234.839.000,- tidak memenuhi target sebesar Rp. 690.850.000,-, atau terdapat selisih sebesar (Rp. 456.011.000,-), belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.593.851.365,- tidak memenuhi target sebesar Rp. 3.826.808.239,- atau terdapat selisih sebesar (Rp. 232.956.874,-). Dan belanja modal sebesar Rp. 455.260.000,- tidak memenuhi target sebesar Rp. 458.380.000,- atau terdapat selisih sebesar (Rp. 3.120.000,-). Total realisasi belanja langsung sebesar Rp. 4.283.950.365,- tidak memenuhi target sebesar Rp. 4.976.038.239,- atau terdapat selisih sebesar (Rp. 692.087.874,-).

Efektifitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan dan merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dengan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan.

Analisis Efektifitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dengan menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas realisasi belanja daerah

dikatakan efektif bilamana persentase yang diperoleh dari rumus di atas semakin besar, demikian sebaliknya dikatakan tidak efektif bilamana persentase yang diperoleh semakin kecil. Rasio efektifitas realisasi belanja daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya pajak daerah yang diterima dengan anggaran pajak daerah yang ditetapkan. Hasil dari perhitungan rasio efektifitas realisasi belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Efektifitas Belanja Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020

Uraian	Target	Penerimaan	Rasio (%)	Kriteria
Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.842.665.115,-	Rp. 3.826.791.782,-	99,59	Efektif
Belanja Langsung	Rp. 4.976.038.239,-	Rp. 4.283.950.365,-	86,09	Cukup Efektif
Total Belanja	Rp. 8.818.703.354,-	Rp. 8.110.742.147,-	91,97	Efektif

Sumber : Data Olahan 2021

Pembahasan

Efektifitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan dan merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dengan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan.

Analisis Efektifitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dengan menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas realisasi belanja daerah dikatakan efektif bilamana persentase yang diperoleh dari rumus di atas semakin besar, demikian sebaliknya dikatakan tidak efektif bilamana persentase yang diperoleh semakin kecil. Rasio efektifitas realisasi belanja daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya pajak daerah yang diterima dengan anggaran pajak daerah yang ditetapkan. Hasil dari perhitungan rasio efektifitas realisasi belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Efektifitas Belanja Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020

Uraian	Target	Penerimaan	Rasio (%)	Kriteria
Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.842.665.115,-	Rp. 3.826.791.782,-	99,59	Efektif
Belanja Langsung	Rp. 4.976.038.239,-	Rp. 4.283.950.365,-	86,09	Cukup Efektif
Total Belanja	Rp. 8.818.703.354,-	Rp. 8.110.742.147,-	91,97	Efektif

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan perhitungan rasio Belanja Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 pada tabel 4. diketahui bahwa efektifitas belanja tidak langsung berada pada kriteria efektif, belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2020 cukup efektif sedangkan total realisasi belanja daerah berada pada kriteria efektif.

Penurunan realisasi anggaran pada belanja barang terjadi pada output teknis (bidang/bidang) khususnya anggaran perjalanan dinas dan belanja barang pada output layanan operasional (perkantoran). Diberlakukannya WFH bagi sebagian besar pegawai menyebabkan biaya operasional seperti belanja bahan

bakar minyak, keperluan kantor, alat tulis kantor, perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya menurun drastis. Dengan demikian, banyak kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dijadwalkan selama 1 tahun ke depan terpaksa harus ditunda atau dibatalkan dengan pertimbangan keamanan dan kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Efektifitas belanja tidak langsung Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 berada pada kriteria efektif dengan realisasi sebesar Rp. 3.826.791.782,- dibandingkan dengan target sebesar Rp. 3.842.665.115,-
2. Efektifitas belanja langsung Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 berada pada kriteria cukup efektif dengan realisasi sebesar Rp. 4.283.950.365,- dibandingkan dengan target sebesar Rp. 4.976.038.239,-
3. Efektifitas belanja daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 berada pada kriteria efektif dengan realisasi sebesar Rp. 8.110.742.147,-dibandingkan dengan target sebesar Rp. 8.818.703.354,-.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, sehingga hasil penelitiannya lebih andal dan akurat daripada hasil penelitian oleh penulis.
2. Bagi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran belanja daerah. Dengan kinerja yang baik maka efektifitas, produktivitas dan efisiensi belanja juga akan semakin baik. Terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran agar optimalisasi yang diinginkan segera terlaksana sesuai visi dan misi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam hal efektifitas belanja daerah agar lebih mantap dalam meningkatkan pertumbuhan optimal anggaran belanja yang wajar dan ri tahun sekarang sampai seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah., Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi,M., & Halim. A. (2016). Analisis Laporan Keuangan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Bogor : In Media.
- Kuswandi, A. (2016). Manajemen Pemerintah Daerah. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam 45 (Unisma).
- Lantu, C. (2017). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1260 – 1270. Doi : <https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.16143>
- Lontaan, I. C. (2016). Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal EMBA*, 4(1), 898 – 906. Doi : <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11820>
- Mahsun, M. (2018). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo, (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Rampengan, M. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan

- Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 616 – 623.
Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13530>
- Shatu, Y. P. (2016). Akuntansi Laba dan Rugi. Pustaka Ilmu Semesta. Yogyakarta.
- Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik . UPP - STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2016). Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahyuningsih, T. (2020). Ekonomi Publik. Depok : PT. Raja Grafindo Perseda.